

# TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK-HAK PENGUNGSI (STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA)

Oleh  
Surya Laia  
NIM. 2205040045

## ABSTRAK

Tanggung jawab negara merupakan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap individu yang berada dalam wilayah kekuasaannya, termasuk kelompok rentan seperti pengungsi yang melarikan diri dari konflik, penganiayaan, dan krisis kemanusiaan. Dalam konteks pengungsi Rohingya, kewajiban tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara penerima yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kemanusiaan meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, dan menganalisis tanggung jawab negara Indonesia dalam menjamin hak-hak pengungsi, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam proses pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya dalam studi kasus pengungsi Rohingya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada pengkajian prinsip, norma, dan aturan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi dan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya berdasarkan prinsip *non-refoulement* dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Implementasi kewajiban tersebut diwujudkan melalui kebijakan perlindungan sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang mencakup penyelamatan, penampungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Namun demikian, pemenuhan hak-hak pengungsi secara menyeluruh masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi, keterbatasan kapasitas dan anggaran pemerintah, serta dinamika sosial berupa penolakan masyarakat lokal, sehingga perlindungan yang diberikan masih bersifat terbatas dan sementara serta memerlukan penguatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan Indonesia kepada pengungsi Rohingya masih bersifat minimum dan sementara, sehingga diperlukan penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif guna menjamin pemenuhan hak-hak pengungsi secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Negara, Pengungsi Rohingya, Hak Asasi Manusia, *Non-Refoulement*, Perlindungan Pengungsi

**RESPONSIBILITIES OF THE STATE OF INDONESIA IN GUARANTEEING  
REFUGEE RIGHTS (CASE STUDY OF ROHINGYA REFUGEES IN  
INDONESIA)**

**By**  
**Surya Laia**  
**NIM: 2205040045**

**ABSTRACT**

*State responsibility is the state's obligation to guarantee the protection and fulfillment of human rights for every individual within its jurisdiction, including vulnerable groups such as refugees fleeing conflict, persecution, and humanitarian crises. In the context of Rohingya refugees, this obligation places Indonesia as a host country that has an important role in providing humanitarian protection even though it has not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol. This study aims to find, explain, and analyze Indonesia's state responsibility in guaranteeing the rights of refugees, as well as identifying various obstacles faced by Indonesia in the process of fulfilling these rights, especially in the case study of Rohingya refugees in Indonesia. The research method used is legal research with a normative juridical research type, which emphasizes the study of principles, norms, and positive legal rules related to refugee protection and human rights. The results of the study indicate that Indonesia remains obliged to provide protection to Rohingya refugees based on the principle of non-refoulement and universal humanitarian values. The implementation of these obligations is realized through a temporary protection policy as stipulated in Presidential Regulation Number 125 of 2016, which covers rescue, shelter, and meeting the basic needs of refugees. However, the comprehensive fulfillment of refugee rights still faces obstacles in the form of regulatory limitations, limited government capacity and budget, and social dynamics such as local community resistance. Consequently, the protection provided remains limited and temporary, requiring more comprehensive and sustainable policy strengthening. This study concludes that the protection provided by Indonesia to Rohingya refugees remains minimal and temporary, necessitating the strengthening of a more comprehensive legal and policy framework to ensure the sustainable fulfillment of refugee rights.*

*Keywords: State Responsibility, Rohingya Refugees, Human Rights, Non-Refugee, Refugee Protection*